



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
(DINSOSP3APPKB)

2022

THREE  
ENDS  
DINAS SOSIAL



R  
E  
N  
J  
A

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang akan datang. Renja ini memuat rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

RENJA ini sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam tiga bulan pertama dan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di DINSOSP3APPKB untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pulau Punjung, 2021

Kepala Dinas SOSP3APPKB,



**BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
NIP. 19820521 200012 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINSOSP3APPKB TAHUN LALU .....</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINSOSP3APPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra DINSOSP3APPKB .....	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DINSOSP3APPKB .....	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINSOSP3APPKB .....	37
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINSOSP3APPKB.....</b>	<b>43</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DINSOSP3APPKB .....	43
3.3 Program dan Kegiatan.....	44
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSP3APPKB .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya .

Penyusunan rancangan Renja DINSOSP3APPKB merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja DINSOSP3APPKB yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja DINSOSP3APPKB mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja DINSOSP3APPKB dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DINSOSP3APPKB, evaluasi pelaksanaan Renja DINSOSP3APPKB tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DINSOSP3APPKB.

Penetapan dokumen RENJA DINSOSP3APPKB harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

- a. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan;
- b. Program dan kegiatan dalam Renja DINSOSP3APPKB harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan;
- c. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja DINSOSP3APPKB mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja DINSOSP3APPKB merupakan dokumen yang secara substansi merupakan terjemahan dari Visi, Misi dan Program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Renja merupakan acuan DINSOSP3APPKB untuk memasukkan program/kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022;
- c. Renja DINSOSP3APPKB merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Renja DINSOSP3APPKB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara republik Indonesia) 2006 hal. 1065-1078);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
17. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
23. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2031;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
32. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN No.10/HK.010/B5/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Pusat;
33. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN No.74/HK.010/B5/2001 tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Provinsi dan kabupaten/Kota;
34. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

35. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renja DINSOSP3APPKB adalah membuat rumusan-rumusan perencanaan kemudian mendeskripsikan rancangan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang berisikan kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan Renja DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya untuk masa satu (1) tahun kedepan, sebagai kelanjutan dari hasil capaian kinerja Renja tahun sebelumnya.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun satu (1) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DINSOSP3APPKB.
- c. Meletakkan dasar-dasar motivasi kerja serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat/jajaran DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya.

## **1.4 SISTIMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Dasar Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOSP3APPKB TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINSOSP3APPKB  
Tahun Lalu dan Capaian Renstra DINSOSP3APPKB**
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DINSOSP3APPKB**
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
DINSOSP3APPKB**
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan  
Masyarakat**

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DINSOSP3APPKB**
- 3.3 Program dan Kegiatan**

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSP3APPKB**

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOSP3APPKB TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINSOSP3APPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra DINSOSP3APPKB**

##### **✚ BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN**

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin untuk tahun 2021 mempunyai 2 program pokok:

##### **1. Program Pemberdayaan Sosial**

##### **➤ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.**

##### **Program dan Kegiatan :**

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemberian pengganti transportasi bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat Kecamatan tahun 2021 diberikan penggantian sebanyak 26 kali perjalanan dengan nominal Rp. 100.000,-/org/kali kegiatan dengan total Rp 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Dengan penggantian transportasi diharapkan dapat membantu petugas sosial dilapangan untuk melaksanakan tugas sosialnya dalam penanggulangan permasalahan-permasalahan Kesejahteraan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada, serta dalam membina Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) diwilayah kerjanya masing-masing. Disamping kegiatan diatas juga dilaksanakan pembinaan terhadap pendamping dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Kabupaten Dharmasraya yaitu Suku Anak Dalam (SAD) yang berjumlah 19 KK, 77 Jiwa dan 2 rombongan di 2 titik lokasi yaitu nagari Banai kecamatan Sembilan Koto dan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar. Dari hasil pembinaan tersebut pada tahun ini sudah diterbitkan status kependudukan untuk SAD sebagai warga Kabupaten Dharmasraya yang sah, yang diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk

tahun ini Suku Anak Dalam yang berada di Sembilan Koto, sudah menerima Bantuan sosial BPNT sembako .

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas SDM untuk persiapan pelaksanaan program Puskesmas tahun 2022 yang rencana akan dipusatkan di Dinas SosialP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Nagari Sungai Duo kecamatan Sitiung, Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.168.400,- (Enam puluh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp. 60.131.250,- (enam puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 99,9%.

**Permasalahan dan Solusi :**

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemukan suatu kendala dimana dengan adanya keterbatasan anggaran mengakibatkan pengganti transportasi untuk PSM tidak bisa dibayarkan dan TKSK dibayarkan sebanyak 26 kali kegiatan dari 30 kali kegiatan, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

2. Solusi

- a. Solusi yang sudah dilaksanakan adalah memberikan pembinaan secara berkala serta memberikan motivasi terhadap PSM dan TKSK sehingga Tenaga Relawan dilapangan bisa bekerja secara maksimal
- b. Peningkatan kapasitas TKSK dan PSM dan pilar pilar sosial lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi PPKS

**2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)**

**Program dan Kegiatan :**

Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh ibu Dewi Sutan Riska yang mana kegiatannya bertujuan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat Dharmasraya terutama masyarakat kurang mampu dan memberikan dukungan

pemberdayaan kepada keluarga tertinggal diseluruh nagari dan jorong di Kabupaten Dharmasraya. Bentuk kegiatan yang sudah terlaksana adalah pembinaan terhadap posdaya yang sudah terbentuk dan mengaktifkan posdaya yang sudah terbentuk tapi tidak aktif, disamping itu juga ada kegiatan fasilitasi pembagian hewan qurban kepada seluruh nagari untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemda kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2021 ada 25 ekor sapi qurban dan 3 ekor kambing yang dibagikan kepada masyarakat. LKKS Kabupaten Dharmasraya juga mendapat binaan dari LKKS Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan pelatihan dan workshop baik yang dilakukan di kabupaten maupun di provinsi secara luring maupun daring.

Selain LKKS, juga ada kegiatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mana kegiatan ini merupakan pendampingan terhadap keluarga yang bermasalah seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan.

Pendampingan dimulai dari keluarga sampai ke badan hukum dan persidangan, dilengkapi dengan bantuan/dampingan psikologi. Tahun 2021 ada 16 kasus yang didampingi.

#### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.663.800,- (Tiga puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 30.490.550,- (Tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 99,4 %.

#### **Permasalahan dan Solusi :**

##### 1. Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan terkait kegiatan kelembagaan ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan, disamping itu masyarakat juga masih belum mau untuk melaporkan kasus-kasus yang belum terdampingi

## 2. Solusi

- a. Solusi yang sudah dilaksanakan adalah dengan memberikan pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan pendekatan kepada pemuka-pemuka nagari serta memberikan sosialisasi kepada semua pihak tentang keberadaan LK3 dan LKKS.
- b. Peningkatan kapasitas Tenaga Sosial dilapangan untuk pelaksanaan kegiatan dan program pendampingan kasus dilapangan

## **2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

### **a. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **Program dan Kegiatan :**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Dharmasraya. Tahun 2021 sebanyak 132.519 jiwa dari 41.741 KK. Kegiatan verifikasi ini sangat penting karena Kab/Kota diberikan kesempatan melakukan perbaikan data empat kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Verifikasi dan validasi dilaksanakan pada empat kali setahun oleh Kepala Jorong selaku petugas pendata dan Operator aplikasi SIKS-NG di Nagari. Finalisasi terakhir dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Kepala Jorong dan dapat mengusulkan data baru jika ditemukan masyarakat miskin yang belum ada dalam data DTKS tersebut.

Disamping kegiatan diatas, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pengelolaan data, monitoring dan evaluasi kegiatan Program Sembako. Program Sembako merupakan program perubahan dari Bantuan Pangan Non Tunai menjadi Program Sembako. Program Sembako ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal makanan. Penyaluran dana program Sembako dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) dan tidak dapat diambil tunai. Bila komoditas yang dapat dibelanjakan sebelumnya beras

dan atau telur, pada Program Sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat (jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).

E-Warong yang telah ditunjuk di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 57 e-Warong yang tersebar di 52 Nagari. Setiap bulannya KPM akan mengambil bahan pangan sesuai dengan ketentuan di E-warong dengan syarat membawa kartu KKS, Kartu sudah divaksin dan KTP. Jumlah KPM di Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2021 mengalami perubahan dari KPM reguler sebanyak 8636, ditambah dengan data perluasan program sembako sebanyak 14.501 KPM sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 yang menggoyangkan ekonomi masyarakat diseluruh Indonesia. Data penerima ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Selain program diatas juga dilakukan pengelolaan data penerima manfaat jaminan kesehatan (JKN) baik KPM bersumber dana APBD maupun APBN, jumlah PBI APBD tahun 2021 sebanyak 24.171 jiwa dan APBN sebanyak 55.026 jiwa

#### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 93.417.800,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp. 93.379.300,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau 99,9%.

## **Permasalahan dan Solusi :**

### 1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan permasalahan yaitu :

- a. Masih banyaknya petugas yang kurang paham dengan tugas yang akan mereka kerjakan sebagai petugas verivali karena petugas verivali yang berganti-ganti;
- b. Belum terakomodirnya anggaran untuk petugas verivali setiap bulannya;
- c. Masih ada ditemukan saldo kosong setiap bulannya
- d. Masih belum lengkapnya mesin EDC yang disediakan di E-Warong oleh pihak Himbara (Bank Mandiri) karena ada mesin EDC yang rusak dan belum diganti.

### 2. Solusi

- a. Untuk mengatasi permasalahan diatas sudah diintensifkan komunikasi di Group WhatsApp agar petugas verivali, operator dengan pihak Kabupaten selaku fasilitator bisa saling berbagi informasi dan berdiskusi permasalahan yang ditemukan dilapangan dan permasalahan teknis.
- b. Untuk mengatasi di e-warong telah dilakukan koordinasi dengan pihak Himbara terkait saldo kosong dan mesin EDC yang belum tersedia di beberapa e-Warong. Saldo kosong disebabkan karena kartu hilang dan perubahan nomor rekening beberapa orang KPM. Untuk mesin EDC yang belum tersedia, tetap dipinjamkan disaat pencairan sembako setiap bulannya.

## **BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**

### **1. Program Rehabilitasi Sosial**

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti

- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

## **2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Khusus PKH)

## **3. Program Penanganan Bencana**

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

## **BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**

### **A. Program Rehabilitasi Sosial**, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dengan sub kegiatan :

#### **1) Penyediaan Permakanan**

Penyediaan permakanan merupakan standar pelayanan dasar bidang sosial yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang berada diluar panti yakni berupa paket permakanan yang sesuai standar gizi. Adapun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berjumlah 29 orang : lansia terlantar 21 (dua puluh satu), anak terlantar 2 (dua), penyandang disabilitas terlantar 2 (dua) dan tuna sosial 4 (empat) masing-masing mendapatkan paket permakanan selama 5 (lima) kali dengan paket isi : Beras, Kacang Hijau, Gula, Biskuit, Susu.

#### **Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :**

Dana tersedia sebesar Rp.35.700.000,- terealisasi Rp. 35.700.000,- serapan dana 100 %. Keberhasilan kegiatan 100 %. Kegiatan ini berupa pemberian paket permakanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berjumlah 35 orang : lansia terlantar 21 (dua puluh satu)

orang, anak terlantar 2 (dua) orang, penyandang disabilitas terlantar dan penyandang disabilitas kurang mampu sebanyak 7 (tujuh) orang dan tuna sosial 4 (empat) orang sesuai dengan tuntutan Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar Bidang Sosial.

**Permasalahan dan Solusi :**

- 1) Permasalahan
  - a) Keterbatasan dana hanya bisa memberikan paket permakanan sebanyak 5 kali dan terbatas kepada PPKS yang benar-benar memerlukan.
  - b) Regulasi yang ditetapkan pusat tidak bisa dijalankan dilapangan, karena ada keadaan yang sifatnya penting/emergensi yang perlu penanganan secepatnya.
  
- 2) Solusi
  - a) Memberikan bantuan kepada PPKS sesuai skala prioritas.
  - b) Mengajukan proposal kepada pusat untuk memfasilitasi pemberian paket permakanan yang tidak bisa diakomodir melalui dana APBD.

**2) Penyediaan Alat Bantu**

Penyediaan alat bantu kepada PPKS yakni Penyandang Disabilitas Kurang Mampu dan Lansia Kurang Mampu karena keterbatasan dalam melakukan aktivitas maka memerlukan alat bantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Adapun alat bantu tersebut berupa : kursi roda, tongkat dan alat bantu dengar.

**Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :**

Dana tersedia sebesar Rp.15.200.000,- terealisasi Rp. 15.200.000,- serapan dana 100 %. Keberhasilan kegiatan 100 %. Kegiatan ini berupa pemberian alat bantu kepada 15 (lima belas) orang PPKS yang mempunyai keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yakni lansia kurang mampu dan penyandang disabilitas kurang mampu. Alat bantu tersebut berupa :

- Kursi roda : 8 unit
- Alat bantu dengar : 2 unit

- Tingkat : 5 unit

### **Permasalahan dan Solusi :**

#### 1) Permasalahan

- a) Keterbatasan dana hanya bisa memberikan alat bantu kepada PPKS yang benar-benar memerlukan.
- b) Pemberian bantuan alat bantu melalui dana pokir DPR RI masih belum tepat sasaran/asal mendafta dan tidak adanya laporan ke Dinas Sosial.

#### 2) Solusi

- a) Memberikan bantuan kepada PPKS sesuai skala prioritas.
- b) Mengajukan proposal kepada pusat untuk memfasilitasi pemberian paket alat bantu yang tidak bisa diakomodir melalui dana APBD.

### **3) Pemberian Layanan Rujukan**

Yakni memberikan layanan rujukan kepada PPKS yang memerlukan rujukan terhadap tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi baik individu, keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Layanan rujukan ini ditujukan kepada UPT-UPT baik dibawah jajaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Kemensos RI. Tujuan pemberian layanan rujukan ini adalah memberikan bimbingan mental, fisik, spiritual dan sosial kepada yang bersangkutan dan bimbingan pelatihan keterampilan untuk melatih kemandiriannya.

#### **Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :**

Dana tersedia sebesar Rp.11.622.500,- terealisasi Rp. 11.622.500,- serapan dana 100 %. Keberhasilan kegiatan 100 %. Kegiatan ini berupa pemberian layanan rujukan kepada PPKS yang memerlukan rujukan terhadap tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi baik individu, keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. PPKS yang telah dirujuk sebanyak 40 orang dengan rincian :

- PSBR Harapan Padang Panjang : 12 orang
- PSAA Tri Murni Padang Panjang : 5 orang
- PSAA Fastabikul Khairat Koto Baru : 1 orang
- PSAABR Budi Utama Lubuk Alung : 15 orang
- BRSPDM Bina Laras Bengkulu : 2 orang

- PSBG Harapan Ibu Kalumbuk Padang : 1 orang
- PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batusangkar : 1 orang
- BRSPDTD Budi Perkasa Palembang : 1 orang
- PSAA Ikhwanus Shafa Lasi Mudo Agam : 2 orang

**Permasalahan dan Solusi :**

1) Permasalahan

- a) Keterbatasan dana hanya bisa memberikan layanan rujukan kepada PPKS yang benar-benar memerlukan.
- b) Perlunya shelter/rumah aman yang memadai untuk membina, membimbing PPKS sebelum dirujuk.

2) Solusi

- a) Meminta kepada Baznas untuk memfasilitasi PPKS yang perlu dirujuk dan bantuan transport maupun perbekalannya.
- b) Sebagian dana fasilitasi rujukan ke UPT Kemensos RI dibiayai oleh pusat.

**4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga**

Yang dimaksud reunifikasi keluarga adalah mengembalikan PPKS/yang bersangkutan kembali kepada keluarga dan bisa menikmati kehidupan sebagaimana mestinya baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Dharmasraya yakni dengan menunjukkan surat pengantar terlantar/meneruskan perjalanan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota lain, surat keterangan dari kepolisian dan identitas kependudukan.

**Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :**

Dana tersedia sebesar Rp.5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- serapan dana 100 %. Keberhasilan kegiatan 100 %. Kegiatan ini fasilitasi pemulangan PPKS seperti lansia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan orang terlantar termasuk Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) sebanyak 19 (sembilan belas) orang : 2 (dua) orang lansia eterlantar, 2 (dua) orang tuna sosial (ODGJ) dan 15 (lima belas) orang terlantar melalui estafet antar Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi di seluruh Indonesia. Biaya yang diberikan berupa uang transport dan makan selama di perjalanan.

### **Permasalahan dan Solusi :**

#### 1) Permasalahan

- a) Karena keterbatasan dana kita hanya memfasilitasi orang terlantar yang terdekat.
- b) Masih belum adanya sebagian penduduk Indonesia yang belum mempunyai identitas kependudukan. Jadi masih kesulitan untuk melakukan pemulangan kepada keluarganya.

#### 2) Solusi

- a) Meminta bantuan fasilitasi reunifikasi keluarga kepada Baznas.
- b) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota lain maupun kepada keluarganya untuk proses reunifikasi keluarga.

### **5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kepada Keluarga, Masyarakat, Shelter dan Pusat Kesejahteraan Sosial**

Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada keluarga, masyarakat, shelter dan pusat kesejahteraan bersama merupakan usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku, pola pikir, mindset, paradigma sehingga diharapkan akan memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, di shelter dan di pusat-pusat kesejahteraan sosial.

### **Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan :**

Dana tersedia sebesar Rp.20.599.000,- terealisasi Rp. 20.473.200,- serapan dana 99,39 %. Keberhasilan kegiatan 300 % : target bimbingan 200 orang capaian 600 org. Kegiatan ini berupa edukasi, sosialisasi ke keluarga, masyarakat, shelter dan ke pusat-pusat kesejahteraan sosial. Lokus bimbingan ini menitikberatkan pada program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial (terkait kasus-kasus anak yang ditangani sakti peksos) dan perlindungan jaminan sosial. Tim Bimbingan melibatkan stake holder terkait seperti (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kumperdag, Dinas Pendidikan, Kemenag, Camat, Nagari dan pihak-pihak lainnya).

### **Permasalahan dan Solusi :**

- 1) Permasalahan
  - a) Karena keterbatasan dana banyak nagari/daerah yang belum terjangkau dengan bimbingan dimaksud.
  - b) Masih adanya mindset dan paradigma sebagian masyarakat yang susah untuk dirubah.
  
- 2) Solusi
  - a) Tanpa anggaranpun sebagian daerah yang terdekat dengan ibukota tetap kita fasilitasi untuk melakukan bimbingan.
  - b) Perubahan mindset dan paradigma dilakukan dengan pendekatan face to face dan keluarga.

**B. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,** dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Khusus PKH)

### **Program dan Kegiatan :**

Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI melalui seleksi dan telah memenuhi kreteria yang telah ditetapkan. Indek bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :

Bantuan Komponen Setiap Jiwa :

1. IBU HAMIL	Rp. 2.400.000,-	-
2. ANAK USIA DINI	Rp. 2.400.000,-	
3. SD	Rp. 900.000,-	
4. SMP	Rp. 1.500.000,-	
5. SMA	Rp. 2.000.000,-	
6. DISABILITAS BERAT	Rp. 2.400.000,-	
7. LANJUT USIA	Rp. 2.400.000,-	

### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :**

Realisasi fisik 100 %, sedangkan realisasi keuangan dengan dana tersedia Rp.21.177.500,- realisasi 100 %. Resapan dana dipergunakan untuk Jasa Pengganti Transportasi Pendamping PKH. Sedangkan jumlah anggaran dari Kemensos RI untuk program PKH dari Anggaran sebesar Rp.14.108.250.000,- terealisasi sebesar Rp.13.985.125.000 dengan total 5.208 KPM dengan realisasi 99,13%. Alasan terhadap tidaknya realisasi 100% adalah KPM menabung, pergantian pengurus, gagal buka rekening kolektif, pindah alamat.

### **Permasalahan dan Solusi :**

#### 1. Permasalahan

- a. Banyak warga masyarakat yang masih mengeluh untuk bisa dimasukkan sebagai penerima program PKH.
- b. Masih banyaknya warga yang sebenarnya berhak masuk Program Keluarga Harapan namun penentuan quota ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemda tidak berhak untuk menambah tapi berhak untuk mengurangi.

#### 2. Solusi

- a. Semua Kementerian/Lembaga memakai DTKS dan kita sudah mengusulkan untuk penambahan penerima program PKH.
- b. Sudah berupaya untuk sosialisasi dan mengedukasi petugas operator nagari tentang perubahan data DTKS.

## **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

### **C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya**

Bencana yang terjadi selama tahun 2021 adalah bencana alam/sosial yaitu kebakaran, puting beliung, tanah longsor dan banjir. Adapun kejadian bencana secara rinci menurut kecamatan di Kab. Dharmasraya adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Lokasi Kejadian Bencana</b>	<b>Jenis Bencana</b>	<b>Tgl Kejadian Bencana</b>	<b>Korban</b>	<b>Korban (Jiwa)</b>	<b>Jenis Bantuan</b>
1.	SINAMAR	PUTTING BELIUNG	4 JAN 2021	RIDHO FIRNANDO CS	63	- Logistik, Uang
2.	KOTO NAN IV DIBAWUAH	BENC. KEBAKARAN	26 JAN 2021	DARLISMA	5	Logistik, Uang
3.	SUNGAI KAMBUT	BENC. KEBAKARAN	26 JAN 2021	ANTONIUS	3	Logistik, Uang
4.	KOTO NAN IV DIBAWUAH	BENC. KEBAKARAN	22 FEB 2021	MISNAWATI	1	- Logistik, Uang
5	SUNGAI KAMBUT	BENC. KEBAKARAN	3 MARET 2021	MARIATRI PUTRI	35	Logistik, Uang
6	BONJOL	BENC. KEBAKARAN	12 MARET 2021	GUSTI R	2	Logistik, Uang
7	IV KOTO PL PUNJUNG	PUTTING BELIUNG	22 MARET 2021	YOSI ASRIYANTI	4	- Logistik, Uang
8	IV KOTO PL PUNJUNG	PUTTING BELIUNG	22 MARET 2021	EMA	4	- Logistik, Uang
9	KOTO BARU	PUTTING BELIUNG	31 MARET 2021	YUTELMIS	1	- Logistik, Uang
10	KOTO BARU (JIWA)	PUTTING BELIUNG	31 MARET 2021	FERI FAUZAN KURNIAWAN	4	- Logistik, Uang
11	SUNGAI KAMBUT	BENC. KEBAKARAN	31 MARET 2021	PANTI ASUHAN	35	- Logistik, Uang
12	KOTO BARU	BENC. KEBAKARAN	26 April 2021	RESI	4	- Logistik, Uang
13	KOTO BARU	BENC. KEBAKARAN	4 Mei 2021	ROSNA DEWI	3	Logistik, Uang
14	KOTO BARU	BENC. KEBAKARAN	4 Mei 2021	LOLA	5	- Logistik, Uang
15	KOTO BARU	BENC. KEBAKARAN	4 Mei 2021	REZA LIANA	3	- Logistik, Uang
16	KOTO TINGGI	BENC. KEBAKARAN	17 Mei 2021	ZUNDRI	5	- Logistik, Uang
17	SIKABAU	POHON TUMBANG	9 JUNI 2021	HABIDAH	1	- Logistik, Uang
18	SIALANG GAUNG	BENC. KEBAKARAN	11 JUNI 2021	TASRIF DARWIS	4	- Logistik, Uang
19	SUNGAI DUO	BENC. KEBAKARAN	30 JUNI 2021	ALRUMSI	1	- Logistik, Uang
20	SUNGAI DUO	BENC. KEBAKARAN	30 JUNI 2021	DAHLAN EFFENDI	1	- Logistik, Uang
21	SUNGAI DUO	BENC. KEBAKARAN	30 JUNI 2021	SAPUAN	1	- Logistik, Uang
22	SUNGAI DAREH	POHON TUMBANG	2 JULI 2021	IFRIALDO	4	- Logistik, Uang
23	SIKABAU	KORBAN BANJIR	12 JULI 201	RUSDI CS	25	- Logistik
24	TEBING TINGGI	KORBAN BANJIR	12 JULI 2021	SISKA CS	5	- Logistik

25	SITIUNG	BENC. KEBAKARAN	15 SEPT 2021	PONPES NURUL IMAN PISANG REBU	65	- Logistik, Uang
26	KOTO BARU	BANJIR	20 SEPT 2021	RAHADI	5	- Logistik
27	KOTO BARU	BANJIR	20 SEPT 2021	MULYADI	4	- Logistik
28	KOTO BARU	BANJIR	20 SEPT 2021	ANTON	4	- Logistik
29	KOTO BARU	BANJIR	20 SEPT 2021	ZULKIFLI	7	- Logistik
30	KOTO BARU	BANJIR	20 SEPT 2021	ANISMA	1	- Logistik
31	BANAI	BANJIR	1 NOV 2021	RANDI	61	- Logistik
32	TIUMANG	BENC. KEBAKARAN	26 NOV 2021	SUNARDI, SUMARNO	10	- Logistik, Uang
33	SOPAN JAYA	BANJIR	12 DES 2021	SUNARTO CS	372	- Logistik
34	TIUMANG	BANJIR	13 DES 2021	SOUDI P CS	195	- Logistik
35	BONJOL	BANJIR	13 DES 2021	NICA UNHAIRA CS	660	- Logistik
36	ABAI SIAT	BANJIR	13 DES 2021	ZARANI, SM CS	312	- Logistik
37	ABAI SIAT	BANJIR	14 DES 2021	RIA YURISTIA CS	29	- Logistik
38	MUARO SOPAN	BANJIR	14 DES 2021	HARLI CS	38	- Logistik
39	AMPANG KURANJI	BANJIR	14 DES 2021	WENI LISTA CS	71	- Logistik
40	TEBING TINGGI	BANJIR	14 DES 2021	TANTEN SUGIARTO CS	3	- Logistik
41	AMPANG KURANJI	BANJIR	15 DES 2021	WENI LISTA CS	14	- Logistik
42	KOTO SALAK	BANJIR	16 DES 2021	ARMIZON CS	21	- Logistik
TOTAL KORBAN					2.091	-

Jumlah korban :

- Covid 693 KK/5.663 jiwa
- Bencana Alam 1.908 jiwa
- Bencana Sosial 183 jiwa

Total 7.754 jiwa

## 2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi pada umumnya bersifat bencana lokal kecuali bencana Pandemi Covid-19 hampir di seluruh dunia terkena dampak ini.

### **3. Sumber dan jumlah anggaran :**

Terhadap korban bencana diberikan bantuan logistik bencana yang berupa: sembako, family Kid, Kid Ware, Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Khusus, dll. Jumlah dana yang tersedia dalam rangka cepat tanggap darurat tersedia sebesar Rp.505.267.000,- melalui APBD Kab. Dharmasraya pada DPA Dinas SOSP3APPKB Kab. Dharmasraya, sedangkan yang melalui Dana Belanja Sosial Yang Tidak Direncanakan BKD Kab. Dharmasraya Rp.200.000.000,-, melalui Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Rp. 6.850.000,- serta sumbangan pihak ketiga sebesar Rp.65.000.000,-

### **4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana**

Untuk mengantisipasi dan menghadapi terjadinya kemungkinan bencana telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana baik bencana kebakaran, banjir, angin puting beliung maupun kemungkinan bencana yang lainnya, adalah :

- ✓ Memperbanyak armada / Unit pemadam kebakaran;
- ✓ Membentuk lembaga yang menangani bencana, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tim Search And Reschue (SAR) serta Tim Pemadam Kebakaran;
- ✓ Kerjasama lintas sektoral saat terjadinya bencana;
- ✓ Menyediakan bahan makanan untuk antisipasi terjadinya bencana serta menyediakan peralatan penanggulangan bencana, tenda, alat masak untuk dapur umum;
- ✓ Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas dalam penanggulangan bencana;
- ✓ Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang antara lain banjir, tanah longsor, kebakaran dan angin puting beliung.

## **Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

### **1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

### **2. Program Perlindungan Perempuan**

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

### **3. Program Pemenuhan Hak Anak**

- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota

## **1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

### **Kegiatan :**

#### **a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota**

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung pembangunan di berbagai bidang, dan dalam rangka mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Salah satu upaya percepatan pengarusutamaan gender di daerah adalah melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender tahun 2021 meliputi pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya melalui SK Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/94/KPTS-BUP/2021, pembentukan Focal Point PUG di seluruh OPD dan Instansi vertical se-Kabupaten Dharmasraya melalui SK Bupati Nomor: 188.45/92/KPTS-BUP/2021, menyelenggarakan pelatihan PPRG dan penyusunan GAP dan GBS bagi anggota focal point seluruh Organisasi Perangkat Daerah, tersusunnya buku Profil Gender dan Anak, terlaksananya promosi dan advokasi PUG pada TAPD dan jejaring (DPRD, Instansi vertical dan Ormas). Sasaran dari kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender adalah meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Dharmasraya dan menghasilkan anggaran responsif gender dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodir kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kelompok sasaran dalam kegiatan ini adalah Pokja PUG dan Focal Point PUG yang terdiri dari sekretaris dan kasubag perencanaan semua OPD.

Sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam strategi Pengarusutamaan Gender melalui 7 (tujuh) prasyarat dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya diberikan penghargaan **Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama** oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.172.000,- dengan realisasi keuangan Rp.46.805.400,- (97,16%).

## **Permasalahan dan Solusi:**

### 1. Permasalahan

- a. Focal point masing-masing OPD belum maksimal mempromosikan PUG pada unit kerja.
- b. Proses Perencanaan dan Penganggaran pada masing-masing OPD secara umum belum menggunakan GAP dan GBS
- c. Anggaran yang masih terbatas dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang responsif gender.

### 2. Solusi

- a. Peningkatan pemahaman PUG melalui sosialisasi dan pelatihan pada Tim Focal Point OPD sehingga strategi PUG benar-benar dapat diterapkan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- b. Dalam proses perencanaan dan penganggaran OPD menggunakan analisa GAB dan GBS.

## **b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan diantaranya, rapat pertemuan organisasi perempuan, kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Provinsi, kegiatan Study Komparatif dan Sharing Informasi, kegiatan sosialisasi dan seminar dan kegiatan Peringatan Hari Ibu.

### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 660.043.200,- dengan realisasi keuangan Rp. 641.306.021,- (97,16 %).

### **Permasalahan dan Solusi:**

#### 1. Permasalahan

Belum optimalnya peran Organisasi Perempuan sebagai mitra Pemerintah dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Dharmasraya.

#### 2. Solusi

Membuat kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi perempuan sehingga bisa lebih berperan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Dharmasraya.

## **2. Program Perlindungan Perempuan**

Kegiatan:

### **a. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kab/Kota**

Upaya perlindungan perempuan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan meliputi sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat, pembentukan jejaring perlindungan perempuan di tingkat kecamatan dan nagari, penjangkauan kasus-kasus kekerasan serta kegiatan pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan. Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan mengoptimalkan penanganan dan pendampingan terhadap kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya.

### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 75.286.550,- dengan realisasi keuangan Rp. 74.736.400,- (99,27%).

### **Permasalahan dan Solusi:**

#### 1. Permasalahan

- a. Belum optimalnya kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- b. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang upaya pencegahan serta penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
- c. Masih lemahnya jejaring dalam upaya perlindungan perempuan baik di tingkat di kecamatan dan nagari serta instansi terkait lainnya.
- d. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan

#### 2. Solusi

- a. Mengupayakan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan baik dalam bentuk sosialisasi, jejaring dalam pelaporan dan penjangkauan kasus serta upaya pendampingan dan rehabilitasi terhadap perempuan korban tindak kekerasan.
- b. Mengupayakan kegiatan untuk meningkat koordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat serta instansi terkait dalam urusan perlindungan perempuan
- c. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana dalam kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun kapasitas SDM yang ada.

### 3. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan:

- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak. Kegiatan pengembangan KLA meliputi kegiatan pemenuhan hak anak atas 5 (lima) kluster hak anak diantaranya hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta hak perlindungan khusus.

Kegiatan pengembangan KLA yang dilaksanakan tahun 2021 dalam rangka pemenuhan hak sipil dan kebebasan diantaranya melalui Pelatihan Musrenbang bagi Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Nagari. Pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan kegiatan pembinaan pada 6 (enam) Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak antara lain Puskesmas Sungai Dareh, Puskesmas Sitiung I, Puskesmas Sungai Rumbai, Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Koto Baru dan Puskesmas Timpeh. Pemenuhan hak anak atas pendidikan dengan kegiatan pembinaan pada sekolah – sekolah yang telah diinisiasi menjadi sekolah rintisan pengembangan sekolah ramah anak. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan pembinaan pada Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dan Gugus Tugas Nagari layak anak.

Berdasarkan hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2021, Kabupaten Dharmasraya mendapatkan penghargaan sebagai **Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya** dimana sebelumnya pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai **Kabupaten Layak Anak Peringkat Pratama**.

### **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.072.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.274.450,- (98,81%).

### **Permasalahan dan Solusi:**

#### 1. Permasalahan

- a. Masih kurangnya pemahaman, koordinasi, kerjasama tentang kegiatan Kabupaten Layak Anak pada OPD terkait;
- b. Masih kurangnya peran Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam mendukung percepatan Kabupaten Layak Anak;
- c. Belum semua sekolah dan puskesmas menginisiasi menjadi sekolah dan puskesmas ramah anak;
- d. Keterlibatan forum anak dalam perencanaan anggaran masih terbatas.

#### 2. Solusi

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait tentang kegiatan yang mendukung percepatan Kabupaten Layak Anak;
- b. Melakukan sosialisasi Kabupaten Layak Anak pada Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha;
- c. Mendorong semua sekolah dan puskesmas untuk menjadi sekolah dan puskesmas ramah anak;
- d. Melakukan diseminasi informasi kepada pemerintah kecamatan dan nagari untuk melibatkan forum anak dalam musrenbang.

### **Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

#### 1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
  - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

### **Dasar hukum dan kebijakan**

Undang-undang Nomor : 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran UUD nomor : 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB)

**A. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**, dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK Non Fisik)**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp. 2.476.047.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.450.280.900,- atau 98,96 % dan capaian kegiatan 99 %.

Program dan Kegiatan :

- a. Biaya Operasional Penyuluhan KB

Biaya Operasional Penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan/atau peserta ganti cara MKJP, penambahan peserta KB aktif dan Keluarga yang terpapar program Bangga Kencana oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok.

Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.494.802.000,- dan realisasi sebesar Rp. 494.802.000,- dengan realisasi fisik : 100%

b. Biaya Operasional Pengolahan Data

Merupakan biaya untuk mendukung pengolahan data yang dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB PNS/PLKB Non PNS dan Kader IMP yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.158.466.000,- dan realisasi sebesar Rp.158.466.000,- dengan realisasi fisik : 100%

c. Biaya Operasional Pembinaan Kader

Merupakan kegiatan pertemuan dalam rangka meningkatkan kualifikasi Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan melalui pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.53.724.000,- dan realisasi sebesar Rp. 53.724.000,- dengan realisasi fisik : 100%

d. Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan

Merupakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Tenaga Lini Lapangan tentang Program Bangga Kencana. Kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan ini dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp. 60.984.000,- dan realisasi sebesar Rp. 60.984.000,- dengan realisasi fisik : 100%

e. Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa

adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan).

Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp. 39.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 35.753.500,- dengan realisasi fisik : 100%

f. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Dari Gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota Ke Fasilitas Kesehatan/Klinik.

Kegiatan ini mencakup pendistribusian alokon yang terdiri atas kegiatan pengiriman/ekspedisi alokon dan pengepakan serta bongkar/muat alokon dari gudang OPD-KB kabupaten/kota ke

fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang melayani KB. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp. 34.257.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.257.000,- dengan realisasi fisik : 100%

g. Operasional Visitasi dan Registrasi Faskes

Operasional transport visitasi faskes adalah faskes yang teridentifikasi harus melakukan registrasi ulang atau belum teregister di SIM BKKBN dan/atau mengalami permasalahan pelaporan.

Jumlah faskes yang dikunjungi dan teregister, serta jumlah faskes yang melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringannya sebanyak 20 faskes. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp. 10.450.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.450.000,- dengan realisasi fisik : 100%

h. Operasional Penggerakan Pelayanan KB

Merupakan pemberian pelayanan pemasangan IUD, Implan, MOW dan MOP oleh dokter/bidan kompeten. Jumlah akseptor untuk pelayanan MKJP yaitu : IUD/Implant sebanyak : 1.970 akseptor, MOW sebanyak : 7 Akseptor. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.648.178.000,- dan realisasi sebesar Rp. 632.033.900,- dengan realisasi fisik : 99,35%

i. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB

Merupakan biaya yang digunakan untuk membantu operasional kelompok kerja di Kampung KB terdiri dari: Pemetaan masalah dan potensi, Penyusunan rencana kerja masyarakat, Persiapan pelaksanaan kegiatan, Pencatatan dan pelaporan dan Monitoring dan Evaluasi dengan mengacu pada pedoman Pengelolaan Kampung KB. Terdapat 28 kampung KB untuk tahun 2021. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.154.704.000,- dan realisasi sebesar Rp. 154.704.000,- dengan realisasi fisik : 100%

j. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan

Adalah yang digunakan untuk membantu pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan di Kampung KB. Mekanisme operasional adalah bekerjanya atau berfungsinyaberbagai langkah-

langkah operasional Program Bangga Kencana secara teratur, terencana dan terus- yang satu sama lain saling berkaitan, berkesinambungan, bersinergi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di kecamatan, desa/kelurahan, RW/dusun dan RT dalam upaya mencapai sasaran Program Bangga Kencana di Kampung KB. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.154.440.000,- dan realisasi sebesar Rp. 154.440.000,- dengan realisasi fisik : 100%

k. Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN)

Merupakan biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan Keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional. Kegiatan dapat berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan Keluarga. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.248.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 248.600.000,- dengan realisasi fisik : 100%

l. Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Oleh Kader di Wilayah Kerjanya

Merupakan biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub PPKBD untuk melakukan pemutakhiran data Keluarga Indonesia program Bangga Kencana di tingkat desa dan dusun/RW. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.249.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 249.600.000,- dengan realisasi fisik : 100%.

m. Dukungan Manajemen

adalah upaya yang dilakukan oleh PPKBD dan Sub PPKBD dalam melaksanakan KIE individu kepada Keluarga/masyarakat, melalui kunjungan rumah atau bentuk kegiatan momentum. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.101.890.000,- dan realisasi sebesar Rp. 96.236.500,- dengan realisasi fisik : 100%

n. Dukungan Pembuatan Media KIE

Merupakan dukungan pembiayaan untuk melaksanakan KIE program Bangga Kencana, bentuk kegiatan sesuai dengan panduan media KIE dari Direktorat KIE BKKBN Pusat dan/atau bidang yang menangani KIE di Perwakilan BKKBN Provinsi. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.66.352.000,- dan realisasi sebesar Rp.66.230.000,- dengan realisasi fisik : 100%

**2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.1.155.942.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.140.927.700,00,- atau 98,70% dengan capaian fisik 100%.

Program dan Kegiatan :

a. Belanja Obat-Obatan

Merupakan pengadaan belanja obat-obatan yang mendukung pelaksanaan operasional penggerakan pelayanan KB di faskes yang telah ditetapkan. Dana bersumber dari APBD sebanyak Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%

b. Pengadaan Sarana Prasarana Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluhan KB

Merupakan Paket Penguatan sarana dan prasarana Infrastruktur Sistem Informasi Data Keluarga merupakan paket penyediaan perangkat Infrastruktur Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Sistem informasi Keluarga pada tingkat kecamatan yang di dukung oleh Teknologi Informasi yang up to date sehingga dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana menjadi tepat sasaran pada tingkat kecamatan untuk program sektor lainnya yang saling terintegrasi dan bersinergi. Sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga meliputi pilihan kegiatan

penyediaan perangkat layanan broadband internet berbasis satelit, PC dan printer, serta LCD Proyektor yang dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan di Balai Penyuluhan KB.

Pada Tahun Anggaran 2021, ada 11 Balai Penyuluhan KB yang telah mendapatkan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi keluarga (SIGA) dan telah bisa dimanfaatkan yaitu : balai Penyuluhan Pulau Punjung, Sitiung, Sembilan Koto, Timpeh, Padang Laweh, Koto Salak, Tiumang, Koto Baru, Koto Besar, Sungai Rumbai dan Asam Jujuhan. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.557.700.000,- dan realisasi sebesar Rp.543.840.000,- dengan realisasi fisik : 100%

c. Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB

Balai Penyuluhan KB yang direhab untuk TA. 2021 sebanyak 4 unit (Balai Penyuluhan KB Pulau Punjung, Koto Baru, Tiumang dan Koto Salak). Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.491.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 490.090.000,- dengan realisasi fisik : 100%.

d. Furniture dan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB

Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi fisik : 100%

e. Biaya Penunjang

Terdiri dari biaya tender, belanja jasa konsultan, belanja rapat koordinasi, perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar :Rp.57.242.000,- dan realisasi sebesar Rp. 56.997.700,- dengan realisasi fisik : 100%

**B. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS),**  
dilaksanakan melalui kegiatan :

**1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (APBD)**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.75.353.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.235.400,- dengan capaian fisik 100%.

Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemilihan Duta GenRe tingkat Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya mewakili Dharmasraya untuk pemilihan Duta GenRe Tingkat Sumatera Barat yang di adakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang serta melaksanakan pembinaan terhadap kader dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) di Kabupaten Dharmasraya.

**PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

1. Permasalahan:

- a. Masih kurangnya ratio tenaga penyuluh KB di lini lapangan.
- b. Sangat minimnya obat set efek untuk pemasangan alat kontrasepsi yang tidak disediakan oleh BKKBN Perwakilan Sumatera Barat.
- c. Sebaran penduduk yang tidak merata di Kab. Dharmasraya.
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana.
- e. Masih kurangnya pemahaman petugas dalam melaksanakan pelaporan dalam bentuk aplikasi
- f. Masih tingginya angka putus sekolah di nagari / jorong/Kampung KB
- g. Kurangnya peran dan kontribusi OPD lain terhadap pengembangan kampung berkualitas
- h. Masih minimnya penggerakan dari masyarakat terhadap kemajuan kampung berkualitas.

## 2. Solusi:

- a. Maksimalkan peran tenaga PKB/PLKB yang ada, sebanyak 21 orang yang berada di 11 kecamatan.
- b. Ditanggulangi oleh puskesmas tempat pelayanan KB dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi perlu ditangani oleh tenaga yang profesional dan telah mendapatkan pelatihan CTU.
- c. Dilakukan pelayanan GALCINTASTRAN (Daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan transmigrasi ).
- d. Dengan adanya dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dimaksimalkan penyuluhan Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan kader KB di Jorong dan nagari.

### **2.2 Analisa Kinerja DINSOSP3APPKB**

Berdasarkan gambaran kinerja dimana secara garis besarnya, hasil pencapaian (outcome) Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan target sasaran DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana terlihat pada **Tabel 2.2**.

#### **a. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINSOSP3APPKB**

##### **A. Isu-isu penting yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:**

##### **Sosial**

- a. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Belum terarah dan terdayagunakan peran kelembagaan masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Terbatasnya cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial;
- d. Masih terbatasnya pemberdayaan ekonomi bagi fakir miskin;
- e. Banyaknya Potensi Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

- tidak aktif;
- f. Banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS.
  - g. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (Panti dan LKS);
  - h. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan rehabilitasi PMKS;
  - i. Belum berjalannya regulasi ijin pengangkatan anak;
  - j. Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana.

### **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
- b. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) utamanya pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih perlu ditingkatkan;
- c. Terjadinya praktek buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan anak dan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH);
- d. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak;
- e. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif.

### **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- a. Kapasitas daerah
- b. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat aktor ekonomi;
- c. Bonus demografi pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan);
- d. Unmet need tinggi;
- e. Pernikahan perempuan dibawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga;
- f. Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon dan assement kebutuhan berada di OPD lain (Dinkes);
- g. Masih ditemukan keluarga PS dan KS I;
- h. Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/kegiatan, karena pada dasarnya program/kegiatan yang direncanakan adalah merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

### **Sosial**

- a. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Banyaknya Potensi Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tidak aktif;
- c. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (Panti dan LKS);
- d. Masih terbatasnya pemberdayaan ekonomi bagi fakir miskin;
- e. Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana.

### **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
- b. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) utamanya pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih perlu ditingkatkan;
- c. Terjadinya praktek buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan anak dan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH);
- d. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak;
- e. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif.

### **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- a. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat aktor ekonomi;
- b. Unmet need tinggi;
- c. Pernikahan perempuan dibawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga;
- d. Distribusi alokasi belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan

- alokon dan assement kebutuhan berada di OPD lain (Dinkes);
- e. Masih ditemukan keluarga PS dan KS I;

**C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya masih belum optimal dalam melakukan pelayanan hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana operasional.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah secara tidak langsung akan berdampak terhadap pencapaian program, untuk mengantisipasi supaya program dan kegiatan ini tercapai secara optimal perlunya di lengkapi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan DINSOSP3APPKB serta perlu disetujui program-program yang telah direncanakan.

**D. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan DINSOSP3APPKB**

DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya mempunyai urusan wajib pelayanan dasar dalam pelayanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Tantangan Yang Mempengaruhi Pelayanan DINSOSP3APPKB**

No	Tantangan Pelayanan DINSOSP3APPKB
1	Kondisi geografi dan topografi daerah (luas, dataran rendah)
2	Kekurangan sarana/prasarana infrastruktur
3	Konsentrasi penduduk yang tidak merata
4	Rendahnya profesionalisme tenaga kerja yang ada

5	Masih besarnya jumlah pengangguran baik yang berpendidikan maupun tidak
6	Adanya kawasan yang rawan bencana alam
7	Rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan
8	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang KB terutama bagi keluarga miskin
9	Belum adanya <i>database</i> yang refresentatif tentang jumlah keluarga miskin
10	Masih sangat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
11	Rendahnya kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintah Nagari
12	Kurangnya tenaga fungsional pengelola program KB di lapangan
13	Rendahnya partisipasi pria dalam pemakaian alat kontrasepsi

**Tabel 2.4**  
**Peluang yang mempengaruhi Pelayanan DINSOSP3APPKB**

<b>No</b>	<b>Peluang Pelayanan DINSOSP3APPKB</b>
1	Adanya Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2	Adanya penduduk usia produktif yang berpendidikan S.1
3	Adanya program yang dikelola usaha-usaha berskala besar
4	Adanya lembaga/organisasi sosial yang menangani masalah sosial masyarakat, contoh: LK3
5	Adanya lembaga/organisasi sosial yang menangani masalah perempuan dan anak, contohnya: P2TP2A
6	Adanya pekerja sosial di masyarakat, contohnya: Peksos, TKSK, PSM

- 7 Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Perlindungan Anak.
- 8 Banyaknya petugas lapangan yang menangani masalah KB, contohnya: PKB/PLKB, PPKBN/Sub-PPKBN

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINSOSP3APPKB**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DINSOSP3APPKB mendukung pencapaian misi ke **Misi 3 : “Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing”**, **Misi 2 : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”**, dan **Misi ke 4 : “Meningkatkan kualitas Birokrasi Pemerintahan yang efektif dan efisien”**.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DINSOSP3APPKB**

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh DINSOSP3APPKB diuraikan sebagai berikut:

##### **🚦 Bidang Sosial**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Sosial memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat

Sasaran yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat

##### **🚦 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak;
2. Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

### **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penduduk bagi pasangan usia subur

### **3.3 Program dan Kegiatan**

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 **“Terwujudnya Indonesia maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya yang diusulkan pada tahun 2022 sebanyak 13 Program dan 25 kegiatan 81 Sub Kegiatan dengan lokasi tersebar di 54 Nagari, 11 Kecamatan dan di Kabupaten Dharmasraya dengan kebutuhan dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Dharmasraya **Rp. 14.428.928.570,-** (Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

b. Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD Tahun 2021 yang sinkron dengan Rancangan Awal Renja DINSOSP3APPKB Tahun 2022.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
- d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- m. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- n. Pengadaan Mebel
- o. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- p. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- r. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- s. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- t. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- u. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- v. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL,** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- c. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
  - d. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
  - f. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - g. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - h. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - i. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  - j. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
2. **Program PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - b. Penyediaan Permakanan
  - c. Penyediaan Sandang
  - d. Penyediaan Alat Bantu
  - e. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - f. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - g. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - h. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  - i. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
  - j. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

- k. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- l. Pemberian Layanan Kedaruratan
- m. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- n. Pemberian Layanan Rujukan
- o. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- p. Layanan Kedaruratan
- q. Penyediaan Perumahan
- r. Penyediaan Alat Bantu
- s. Layanan Rujukan
- t. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- u. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- v. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

3. **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b. fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga
- c. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

4. **PROGRAM PENANGANAN BENCANA**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Makanan
- c. Penyediaan Sandang
- d. Pelayanan Dukungan Psikososial
- e. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- f. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- g. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- h. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
5. **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
6. **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - e. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
7. **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
9. **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/kota
- c. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya
- b. penyediaan dan distribusi KKBPK melalui media cetak elektronik serta media luar ruang
- c. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- d. pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- e. pembinaan IMP dan program KKBPK dilini Lapangan oleh PKB/PLKB
- f. penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB
- g. peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
- h. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/Kota
- i. pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya
- j. penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP
- k. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB sterilisator
- l. peningkatan kesertaan KB Pria
- m. sarana dan prasarana pelayanan KB
- n. pengadaan sarana prasarana pendataan dan penyuluhan KB di balai penyuluhan KB

**11. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b. pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS)
- c. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- d. promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menjadi orang tua hebat, generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)
- e. pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- f. penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS)
- g. promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja

**12. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- b. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
- c. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan

#### Berwawasan Kependudukan

- e. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
- f. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
- g. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah dan strategi pembangunan sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada **Tabel 3.1 terlampir**.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSP3APPKB**

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan DINSOSP3APPKB berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

#### **4.1 Rencana Program dan Kegiatan DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022**

Rencana Program dan Kegiatan DINSOSP3APPKB Tahun 2022 menurut Bidang-bidangnya dapat diuraikan program dan pagu indikatif adalah sebagai berikut: **(Tabel 4.1 terlampir)**

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 disusun sebagai pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Akuntabilitas kinerja instansi akan dapat dinilai dari pencapaian kegiatan/ program ini yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pada tingkat instansi maupun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab kinerja Bupati sebagai Kepala Daerah.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DINSOSP3APPKB sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

#### **Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DINSOSP3APPKB agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DINSOSP3APPKB dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja DINSOSP3APPKB, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja DINSOSP3APPKB sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian RENJA DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 disusun dan menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan berkembang pesat dalam kurun waktu yang cepat, maka RENJA ini dibuat dengan seksama dan untuk disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kedepan.

Pulau Punjung,

2021

Kepala Dinas SOSP3APPKB,



**BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
NIP. 19820521 200012 1 002

**TABEL 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

DINSOSP3APPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>								
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		DINSOSP3APPKB		5.211.187.570	APBD			5.726.697.507
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DINSOSP3APPKB	DINSOSP3APPKB		90.000.000	APBD			120.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA DINSOSP3APPKB	DINSOSP3APPKB		30.000.000	APBD			40.000.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya perencanaan dan Pelaporan	DINSOSP3APPKB		60.000.000	APBD			80.000.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		DINSOSP3APPKB		3.456.116.400	APBD			3.801.728.040
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran tambahan penghasilan ASN (28 orang)	DINSOSP3APPKB	14	3.456.116.400	APBD		14	3.801.728.040
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		DINSOSP3APPKB		244.101.170	APBD			257.532.467
	Penyediaan Komponen Instalasi	terelisasinya komponen instalasi	DINSOSP3APPKB	1	11.110.000	APBD		3	12.221.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	DINSOSP3APPKB	1	50.002.000	APBD		1	50.002.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	DINSOSP3APPKB	120	8.798.350	APBD		140	9.678.185
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	DINSOSP3APPKB	100	26.400.000	APBD		120	29.040.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan pengadaan	DINSOSP3APPKB	1	59.786.200	APBD		1	59.786.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DINSOSP3APPKB	1	88.004.620	APBD		1	96.805.082
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		DINSOSP3APPKB		9.900.000	APBD			10.890.000
	Pengadaan Mebel	tersedianya Mebeleur kantor (Kursi rapat 15 unit)	DINSOSP3APPKB	17	9.900.000	APBD		19	10.890.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		DINSOSP3APPKB		1.208.823.000	APBD			1.329.705.300
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedinya materai kantor	DINSOSP3APPKB	1100	9.900.000	APBD		1200	10.890.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran rekening telpn, internet, listrik dinas, dan listrik gudang KB	DINSOSP3APPKB	1	55.440.000	APBD		1	60.984.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pengelola keuangan dinas dan gaji PTT, THL, Sopir	DINSOSP3APPKB	1	1.143.483.000	APBD		1	1.257.831.300
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		DINSOSP3APPKB	1	202.247.000	APBD		1	206.841.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan jabatan dan pajak	DINSOSP3APPKB	1	20.900.000	APBD		1	22.990.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pembayaran pajak dan service kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4	DINSOSP3APPKB	9 unit, 32 unit	156.300.000	APBD		9 unit, 32 unit	156.300.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	DINSOSP3APPKB	33	25.047.000	APBD		33	27.551.700
	<b>BIDANG SOSIAL</b>								
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>DINSOSP3APPKB</b>		<b>1.350.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>1.600.000.000</b>
	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase KAT yang terlatih</b>	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>85%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>400.000.000</b>
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terselenggaranya Pemberdayaan KAT	Nagari Banai	85%	200.000.000	APBD		90	250.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pendampingan terhadap KAT	Nagari Banai	85%	100.000.000	APBD		90	150.000.000
	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin UGB dan PUB</b>	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>150.000.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin UGB dan PUB	Kab. Dharmasraya	5 DOKUMEN	150.000.000	APBD		5	150.000.000
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS yang terlatih</b>	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>85%</b>	<b>900.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>90</b>	<b>1.050.000.000</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang terlatih	52 Nagari	52 Orang	200.000.000	APBD		52	250.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS yang Terlatih	11 Kecamatan	11 Orang	250.000.000	APBD		11	275.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Keluarga yang terlatih dan LKKS	Kab. Dharmasraya	Orang	150.000.000	APBD		50	175.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terlatih	Kab. Dharmasraya	13 LKS	150.000.000	APBD		13	175.000.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang terlatih	Kab. Dharmasraya	30 Orang	150.000.000	APBD		30	175.000.000
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>979.500.000</b>	<b>APBD</b>			<b>1.157.000.000</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>549.500.000</b>	<b>APBD</b>			<b>667.000.000</b>
	Penyediaan Perumahan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket perumahan sesuai standar gizi	Kab. Dharmasraya	420	105.000.000	APBD	SPM	440	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	penyediaan sandang	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket sandang	Kab. Dharmasraya	35	50.000.000	APBD		40	55.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memanfaatkan alat bantu	Kab. Dharmasraya	20	25.000.000	APBD	SPM	25	40.000.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	Kab. Dharmasraya	30	15.000.000	APBD	SPM	30	20.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	11 Kecamatan	35	50.000.000	APBD	SPM	40	60.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	11 Kecamatan	500	50.000.000	APBD	SPM	600	110.000.000
	fasilitasi pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan KIA (kartu identitas anak)	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Kab. Dharmasraya	3	7.500.000	APBD		4	10.000.000
	pemberian akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Kab. Dharmasraya	35	50.000.000			40	60.000.000
	pemberian layanan data dan pengaduan	jumlah layanan data pengaduan yang dimiliki	Kab. Dharmasraya	1	20.000.000			1	20.000.000
	pemberian layanan kedaruratan	jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Kab. Dharmasraya	1	120.000.000		SPM	1	120.000.000
	pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Kab. Dharmasraya	10	5.000.000			15	10.000.000
	pemberian layanan rujukan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dirujuk	Kab. Dharmasraya	20	52.000.000		SPM	20	52.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Kab. Dharmasraya		430.000.000	APBD			490.000.000
	Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kab. Dharmasraya	35 Org	50.000.000	APBD		40	55.000.000
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Kab. Dharmasraya	200 paket	105.000.000	APBD		400	110.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memanfaatkan alat bantu	Kab. Dharmasraya	10 Unit	25.000.000	APBD		25	40.000.000
	Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dirujuk	Kab. Dharmasraya	10 Orang	50.000.000	APBD		25	55.000.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA direunifikasi dengan keluarga	Kab. Dharmasraya	10 Orang	15.000.000	APBD		30	20.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	11 Kecamatan	20 Org	50.000.000	APBD		40	60.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Kab. Dharmasraya	400 Org	100.000.000	APBD		600	110.000.000
	penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Kab. Dharmasraya	3	15.000.000	APBD		5	20.000.000
	kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas sosial Kabupaten/kota	jumlah lembaga dan kemitraan yang terbentuk	Kab. Dharmasraya	2	20.000.000	APBD		2	20.000.000
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>1.600.000.000</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>1.600.000.000</b>
	fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah KPM PKH yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	4466	500.000.000	APBD		5.000	550.000.000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	11 Kecamatan	100%	600.000.000	APBD		100	600.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin	Kab. Dharmasraya	100%	400.000.000	APBD		100	450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		Kab. Dharmasraya		900.000.000	APBD			725.000.000
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		Kab. Dharmasraya		800.000.000	APBD			620.000.000
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang terpebuhi kebutuhan makan	Kab. Dharmasraya	1.000 korban	200.000.000	APBD	SPM	1000	210.000.000
	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Kab. Dharmasraya	1.000	200.000.000			1.000	200.000.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Kab. Dharmasraya	13	325.000.000			13	130.000.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah paket pemakanan khusus bagi kelompok rentan	Kab. Dharmasraya	50	25.000.000			60	30.000.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan psikososial	Kab. Dharmasraya	1000	50.000.000			1000	50.000.000
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				100.000.000	APBD			105.000.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Relawan Sosial Taruna Siaga Bencana yang meningkat kemampuan dan skilnya dalam penanganan bencana	Kab. Dharmasraya	20 Org	100.000.000	APBD		21	105.000.000
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		Kab. Dharmasraya		54.407.000	APBD			57.127.350
	<b>Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota</b>		Kab. Dharmasraya		54.407.000				57.127.350
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelatihan PPRG	Kabupaten Dharmasraya	38 OPD	54.407.000	APBD		38 OPD	57.127.350
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				700.000.000				808.500.000
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegah kekerasan pada wanita rawan perlakuan kekerasan	11 kecamatan	80%	500.000.000	APBD			525.000.000
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan perlindungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegah kekerasan pada wanita rawan perlakuan kekerasan	11 kecamatan	80%	500.000.000	APBD		80%	525.000.000
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Terbentuknya UPTD PPA untuk Layanan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Kabupaten Dharmasraya	100%	30.000.000	APBD		100%	31.500.000
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasikannya Hotline Layanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan KIE dan Pemasangan Baliho	11 kecamatan	100%	30.000.000	APBD			31.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota</b>		Kab. Dharmasraya	100%	170.000.000			100%	252.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan bagi anggota Satgas PPA	Kabupaten Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD		100%	126.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan usaha bagi perempuan rawan ekonomi	Kabupaten Dharmasraya	100%	120.000.000	APBD		100%	126.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>50.000.000</b>				<b>52.500.000</b>
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah</b>	<b>Tersedianya data terpilah perempuan dan anak</b>	<b>Kabupaten Dharmasraya</b>		<b>50.000.000</b>	APBD			<b>52.500.000</b>
	Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data terpilah perempuan dan anak	Kabupaten Dharmasraya		50.000.000	APBD			52.500.000
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>				<b>250.000.000</b>				<b>262.500.000</b>
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Layak Anak</b>	<b>Kabupaten Dharmasraya</b>	<b>Pratama</b>	<b>250.000.000</b>	APBD			<b>262.500.000</b>
	pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupate/kota	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Dharmasraya	Pratama	250.000.000	APBD		Pratama	262.500.000
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>310.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>325.500.000</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap siswa SMP dan SMA</b>	<b>11 kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	APBD			<b>63.000.000</b>
	advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap siswa SMP dan SMA	11 kecamatan	100%	60.000.000	APBD			63.000.000
	<b>penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah</b>		<b>Kabupaten Dharmasraya</b>		<b>250.000.000</b>	APBD			<b>262.500.000</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh nagari	48 Nagari	80%	200.000.000	APBD			210.000.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Terlaksananya pengadaan KIE dan baliho untuk edukasi pencegahan	250 Sekolah	80%	50.000.000	APBD			52.500.000
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		Kab. Dharmasraya		1.833.250.000	APBD			204.600.000
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya</b>	<b>persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program</b>	Kab. Dharmasraya	85%	118.250.000	APBD			55.000.000
	penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	jenis Lembar Balik, Poster untuk pengetahuan Lini Lapangan	11 Kecamatan	3 Jenis	55.000.000	APBD		-	-
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	persentase pemahaman Stakeholder terhadap program Bangsa Kencana	11 Kecamatan	90%	63.250.000	APBD		-	-
	promosi & KIE program KKBPK melalui media lainnya sesuai kearifan lokal dalam pencitraan	persentase masyarakat yang paham dan mengerti tentang program Bangsa		-	-			85%	55.000.000
	<b>pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</b>	<b>persentase kemampuan petugas penyuluh KB dalam menjalankan program Bangsa Kencana</b>	Kab. Dharmasraya	95%	228.250.000			95	75.000.000
	pembinaan IMP dan program KKBPK dilini Lapangan oleh PKB/PLKB	persentase pemahaman kader IMP terhadap program KKBK	11 Kecamatan	85%	63.250.000	APBD		25	63.250.000
	penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	terpenuhinya sarana di balai KB	11 Kecamatan	100%	165.000.000	DAK		-	-
	pengerakan kader Institusi masyarakat pedesaan	persentase kemampuan SDM dilapangan		-	-			53 orang	11.750.000
	<b>Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan</b>	<b>terpenuhi kebutuhan Alokasi di semua Faskes</b>	Kab. Dharmasraya	100%	1.486.750.000	APBD			74.600.000
	peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	persentase operasional capaian kesertaan KB MKJP	14 Faskes	100%	25.200.000	APBD			
	pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang KB di berbagai Faskes	21 Faskes	85%	6.300.000	APBD		-	7.500.000
	penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	persentase komplikasi dan kegagalan Akseptor	11 Kecamatan	90%	22.000.000	APBD		-	-
	peningkatan kompetensi pengelola & petugas logistik Alokasi serta sarana penunjang pelayanan KB	persentase kemampuan petugas pengelola Faskes		-	-			25%	6.050.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB sterilisator	tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di semua Faskes	14 Faskes	95%	70.000.000	DAK		-	-
	pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	persentase Akseptor yang mendapatkan pelayanan KB		-	-			95%	61.050.000
	sarana dan prasarana pelayanan KB	rehab gudang KB	Kab. Dharmasraya	1 unit	100.000.000	DAK		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengadaan sarana prasarana pendataan dan penyuluhan KB di balai penyuluhan KB	Rehap balai penyuluhan	7 Kecamatan (IX Koto, Sitiung, Timoh Padang	7 unit	1.200.000.000	DAK		-	-
	peningkatan kesertaan KB Pria	terpenuhi capaian Akseptor KB MOP	11 Kecamatan	90%	63.250.000	APBD		-	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>590.584.000</b>	<b>APBD</b>			<b>606.000.000</b>
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>468.584.000</b>	<b>APBD</b>			<b>479.000.000</b>
	pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS)	tersedianya sarana prasarana penunjang penyuluhan	11 Kecamatan dan kampung KB	80%	146.686.000	APBD		85%	152.000.000
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 Kecamatan dan kampung KB	21 PLKB dan Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS)	134.598.000	APBD		21 PLKB dan Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS)	139.000.000
	promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menjadi orang tua hebat, generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	jumlah kelompok mendapatkan sosialisasi kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKS)	11 Kecamatan dan kelompok	660 orang	187.300.000	APBD		210 orang	188.000.000
	<b>pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>122.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>127.000.000</b>
	penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	terbitnya SK mitra kerja dalam pembinaan	Kab. Dharmasraya	6 Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS)	54.000.000	APBD		2 kelompok	56.000.000
	promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	tersedianya informasi tentang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	11 kecamatan	6 Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS)	68.000.000	APBD		6 Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS)	71.000.000
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				<b>700.000.000</b>				<b>753.200.000</b>
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan	<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>700.000.000</b>	<b>APBD</b>			<b>753.200.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terbitnya Peraturan Daerah	Kab. Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD		100%	65.000.000
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	Tersedianya Pedoman RPJMD	Kab. Dharmasraya	100%	100.000.000	APBD		100%	120.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase Wilayah Pendataan	Kab. Dharmasraya	80%	150.000.000	APBD		80%	155.000.000
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah penetapan profil kependudukan	11 Kecamatan	80%	150.000.000	APBD		80%	155.000.000
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur	Jumlah Sekolah teradvokasi	11 Kecamatan	50%	100.000.000	DAK		65%	105.000.000
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Rapat	11 Kecamatan	1760 orang	150.000.000	DAK		1840 orang	153.200.000
<b>JUMLAH</b>					<b>14.428.928.570</b>				<b>13.878.624.857</b>

Pulau Punjung,

2021


  
**KEPALA DINAS,**  
**BOBBY P. RIZA, S.STP, M.SI**  
 Pembina Utama Muda/IVc  
 NIP. 19820521 200012 1 002

**TABEL 4.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSP3APPKB**

DINSOSP3APPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>						
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>DINSOSP3APPKB</b>		<b>5.211.187.570</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>DINSOSP3APPKB</b>		<b>90.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-	Tersusunnya dokumen RKA DINSOSP3APPKB	DINSOSP3APPKB		30.000.000	APBD	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya perencanaan dan Pelaporan	DINSOSP3APPKB		60.000.000	APBD	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>DINSOSP3APPKB</b>		<b>3.456.116.400</b>	<b>APBD</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran tambahan penghasilan ASN (28 orang)	DINSOSP3APPKB	14	3.456.116.400	APBD	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>DINSOSP3APPKB</b>		<b>244.101.170</b>	<b>APBD</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terrealisasinya komponen instalasi listrik	DINSOSP3APPKB	1	11.110.000	APBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	DINSOSP3APPKB	1	50.002.000	APBD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	DINSOSP3APPKB	120	8.798.350	APBD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	DINSOSP3APPKB	100	26.400.000	APBD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan pengadaan	DINSOSP3APPKB	1	59.786.200	APBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DINSOSP3APPKB	1	88.004.620	APBD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>DINSOSP3APPKB</b>		<b>9.900.000</b>	<b>APBD</b>	
	Pengadaan Mebel	tersedianya Mebeleur kantor (Kursi rapat 15 unit)	DINSOSP3APPKB	17	9.900.000	APBD	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>DINSOSP3APPKB</b>		<b>1.208.823.000</b>	<b>APBD</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai kantor	DINSOSP3APPKB	1100	9.900.000	APBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran rekening telpon, internet, listrik dinas, dan listrik gudang KB	DINSOSP3APPKB	1	55.440.000	APBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pengelola keuangan dinas dan gaji PTT, THL, Sopir	DINSOSP3APPKB	1	1.143.483.000	APBD	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>DINSOSP3APPKB</b>	<b>1</b>	<b>202.247.000</b>	<b>APBD</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan jabatan dan pajak	DINSOSP3APPKB	1	20.900.000	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pembayaran pajak dan service kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4	DINSOSP3APPKB	9 unit, 32 unit	156.300.000	APBD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	DINSOSP3APPKB	33	25.047.000	APBD	
	<b>BIDANG SOSIAL</b>						
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>DINSOSP3APPKB</b>		<b>1.350.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase KAT yang terlatih</b>	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>85%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terselenggaranya Pemberdayaan KAT	Nagari Banai	85%	200.000.000	APBD	
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pendampingan terhadap KAT	Nagari Banai	85%	100.000.000	APBD	
	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin UGB dan PUB</b>	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin UGB dan PUB	Kab. Dharmasraya	5 DOKUMEN	150.000.000	APBD	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	<b>Persentase PSKS yang terlatih</b>	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>85%</b>	<b>900.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Jumlah PSM yang terlatih	52 Nagari	52 Orang	200.000.000	APBD	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Terlatih	11 Kecamatan	11 Orang	250.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Keluarga yang terlatih dan LKKS	Kab. Dharmasraya	Orang	150.000.000	APBD	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terlatih	Kab. Dharmasraya	13 LKS	150.000.000	APBD	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang terlatih	Kab. Dharmasraya	30 Orang	150.000.000	APBD	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>979.500.000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>549.500.000</b>	<b>APBD</b>	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Kab. Dharmasraya	420	105.000.000	APBD	
	penyediaan sandang	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket sandang	Kab. Dharmasraya	35	50.000.000	APBD	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memanfaatkan alat bantu	Kab. Dharmasraya	20	25.000.000	APBD	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	Kab. Dharmasraya	30	15.000.000	APBD	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	11 Kecamatan	35	50.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	11 Kecamatan	500	50.000.000	APBD	
	fasilitasi pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan KIA (kartu identitas anak)	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Kab. Dharmasraya	3	7.500.000	APBD	
	pemberian akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Kab. Dharmasraya	35	50.000.000		
	pemberian layanan data dan pengaduan	jumlah layanan data pengaduan yang dimiliki	Kab. Dharmasraya	1	20.000.000		
	pemberian layanan kedaruratan	jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Kab. Dharmasraya	1	120.000.000		
	pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Kab. Dharmasraya	10	5.000.000		
	pemberian layanan rujukan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dirujuk	Kab. Dharmasraya	20	52.000.000		
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>430.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dijangkau	Kab. Dharmasraya	35 Org	50.000.000	APBD	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Kab. Dharmasraya	200 paket	105.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memanfaatkan alat bantu	Kab. Dharmasraya	10 Unit	25.000.000	APBD	
	Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dirujuk	Kab. Dharmasraya	10 Orang	50.000.000	APBD	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA direunifikasi dengan keluarga	Kab. Dharmasraya	10 Orang	15.000.000	APBD	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	11 Kecamatan	20 Org	50.000.000	APBD	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Kab. Dharmasraya	400 Org	100.000.000	APBD	
	penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Kab. Dharmasraya	3	15.000.000	APBD	
	kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitas sosial Kabupaten/kota	jumlah lembaga dan kemitraan yang terbentuk	Kab. Dharmasraya	2	20.000.000	APBD	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	4466	500.000.000	APBD	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	11 Kecamatan	100%	600.000.000	APBD	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin	Kab. Dharmasraya	100%	400.000.000	APBD	
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>900.000.000</b>	<b>APBD</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>800.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan makan	Kab. Dharmasraya	1.000 korban	200.000.000	APBD	
	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Kab. Dharmasraya	1.000	200.000.000		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Kab. Dharmasraya	13	325.000.000		
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah paket pemakanan khusus bagi kelompok rentan	Kab. Dharmasraya	50	25.000.000		
	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan psikososial	Kab. Dharmasraya	1000	50.000.000		
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Relawan Sosial Taruna Siaga Bencana yang meningkat kemampuan dan skilnya dalam penanganan bencana	Kab. Dharmasraya	20 Org	100.000.000	APBD	
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>54.407.000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>54.407.000</b>		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelatihan PPRG	Kabupaten Dharmasraya	38 OPD	54.407.000	APBD	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>700.000.000</b>		
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegah kekerasan pada wanita rawan perlakuan kekerasan</b>	<b>11 kecamatan</b>	<b>80%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan perlindungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegah kekerasan pada wanita rawan perlakuan kekerasan	11 kecamatan	80%	500.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya UPTD PPA untuk Layanan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Kabupaten Dharmasraya	100%	30.000.000	APBD	
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasikannya Hotline Layanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan KIE dan Pemasangan Baliho	11 kecamatan	100%	30.000.000	APBD	
	<b>Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>170.000.000</b>		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan bagi anggota Satgas PPA	Kabupaten Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan usaha bagi perempuan rawan ekonomi	Kabupaten Dharmasraya	100%	120.000.000	APBD	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>50.000.000</b>		
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya data terpilah perempuan dan anak</b>	<b>Kabupaten Dharmasraya</b>		<b>50.000.000</b>	APBD	
	Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data terpilah perempuan dan anak	Kabupaten Dharmasraya		50.000.000	APBD	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>				<b>250.000.000</b>		
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Layak Anak</b>	<b>Kabupaten Dharmasraya</b>	<b>Pratama</b>	<b>250.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupate/kota	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Dharmasraya	Pratama	250.000.000	APBD	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>310.000.000</b>	<b>APBD</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap siswa SMP dan SMA</b>	<b>11 kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap siswa SMP dan SMA	11 kecamatan	100%	60.000.000	APBD	
	<b>penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Kabupaten Dharmasraya</b>		<b>250.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh nagari	48 Nagari	80%	200.000.000	APBD	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan KIE dan baliho untuk edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak di setiap sekolah	250 Sekolah	80%	50.000.000	APBD	
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>1.833.250.000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangsa Kencana</b>	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>85%</b>	<b>118.250.000</b>	<b>APBD</b>	
	penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	jenis Lembar Balik, Poster untuk pengetahuan Lini Lapangan	11 Kecamatan	3 Jenis	55.000.000	APBD	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	persentase pemahaman Stakeholder terhadap program Bangsa Kencana	11 Kecamatan	90%	63.250.000	APBD	
	<b>pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</b>	<b>persentase kemampuan petugas penyuluh KB dalam menjalankan program Bangsa Kencana</b>	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>95%</b>	<b>228.250.000</b>		
	pembinaan IMP dan program KKBPK dilini Lapangan oleh PKB/PLKB	persentase pemahaman kader IMP terhadap program KKBK	11 Kecamatan	85%	63.250.000	APBD	
	penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	terpenuhinya sarana di balai KB	11 Kecamatan	100%	165.000.000	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/Kota	terpenuhi kebutuhan Alokasi di semua Faskes	Kab. Dharmasraya	100%	1.486.750.000	APBD	
	peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	persentase operasional capaian kesertaan KB MKJP	14 Faskes	100%	25.200.000	APBD	
	pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang KB di berbagai Faskes	21 Faskes	85%	6.300.000	APBD	
	penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	persentase komplikasi dan kegagalan Akseptor	11 Kecamatan	90%	22.000.000	APBD	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB sterilisator	tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di semua Faskes	14 Faskes	95%	70.000.000	DAK	
	sarana dan prasarana pelayanan KB	rehab gudang KB	Kab. Dharmasraya	1 unit	100.000.000	DAK	
	pengadaan sarana prasarana pendataan dan penyuluhan KB di balai penyuluhan KB	Rehab balai penyuluhan	7 kecamatan (IX Koto, Sitiung, Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Asam Jujuhan, Sungai Rumbai)	7 unit	1.200.000.000	DAK	
	peningkatan kesertaan KB Pria	terpenuhi capaian Akseptor KB MOP	11 Kecamatan	90%	63.250.000	APBD	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>590.584.000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>468.584.000</b>	<b>APBD</b>	
	pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS)	tersedianya sarana prasarana penunjang penyuluhan	11 Kecamatan dan kampung KB	80%	146.686.000	APBD	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 Kecamatan dan kampung KB	21 PLKB dan Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS)	134.598.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menjadi orang tua hebat, generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	jumlah kelompok mendapatkan sosialisasi kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKS)	11 Kecamatan dan kelompok	660 orang	187.300.000	APBD	
	<b>pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>122.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	terbitnya SK mitra kerja dalam pembinaan	Kab. Dharmasraya	6 Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS)	54.000.000	APBD	
	promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	tersedianya informasi tentang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	11 kecamatan	6 Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS)	68.000.000	APBD	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				<b>700.000.000</b>		
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan</b>	<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>700.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Terbitnya Peraturan Daerah	Kab. Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 sebelum perubahan				Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Pedoman RPJMD	Kab. Dharmasraya	100%	100.000.000	APBD	
	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase Wilayah Pendataan	Kab. Dharmasraya	80%	150.000.000	APBD	
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah penetapan profil kependudukan	11 Kecamatan	80%	150.000.000	APBD	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sekolah teradvokasi	11 Kecamatan	50%	100.000.000	DAK	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Pelaksanaan Rapat	11 Kecamatan	1760 orang	150.000.000	DAK	
<b>JUMLAH</b>						<b>14.428.928.570</b>	

Pulau Punjung,

2021


  
**KEPALA DINAS,**  
**BOBBY P. RIZA, S.STP, M.SI**  
 Pembina Utama Muda/IVc  
 NIP. 19820521 200012 1 002